



KUMPULAN CERITA PERUBAHAN **KOMPAK** **KEPENDUDUKAN**



Daftar Isi



Bansos Perdana di Usia Senja



▲ Pelayanan adminduk “jemput bola” memungkinkan warga lansia mengurus dokumen kependudukan dengan mudah. (foto diambil sebelum pandemi)

Sejumlah warga Desa Suradadi, Nusa Tenggara Barat, akhirnya memperoleh BLT-Dana Desa setelah memiliki KTP dan KK. Kerjasama KOMPAK dengan Pemerintah Desa, Pokja Adminduk, Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, dan LPA NTB yang bersifat “jemput bola” memungkinkan warga yang sudah sangat sepuh seperti Kartanah (90) dan Sala (92) dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lancar sehingga untuk pertama kalinya dalam hidup mereka bisa menerima bantuan pemerintah.

Kartanah (90) adalah lansia asal Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sang suami meninggal beberapa tahun silam sehingga ia tinggal bersama putrinya, Ruminah (40), yang juga kehilangan suami saat kedua putrinya masih kecil. Kebutuhan hidup memaksa Ruminah banting tulang bekerja serabutan tiap hari, terutama sebagai buruh tani.

Sebetulnya Kartanah berhak mendapat bantuan karena Pemerintah Desa Suradadi memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Tapi Kartanah tak tahu ia harus memiliki dokumen kependudukan (KTP dan KK) sebagai syarat. Ia bahkan tak tahu BLT-Dana Desa dapat diperolehnya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

“Saya tidak tahu apa gunanya dokumen kependudukan. Selama ini kami sibuk kerja, sibuk cari makan. Tidak tahu urusan pemerintah,” terang Kartanah.



▲ Anggota Pokja Adminduk mengunjungi langsung kediaman penduduk lansia, untuk membantu pengisian formulir hingga perekaman data biometrik untuk e-KTP.

Seperti Kartanah, Sala Wraga (92) juga tidak memiliki dokumen kependudukan dan sama sekali tidak tahu dirinya berhak menerima bantuan. Sejak suaminya wafat 23 tahun silam, Sala tinggal bersama putranya yang belum menikah, Adni (24). Ia menghabiskan hari-hari di rumah karena tak kuat lagi berjalan dan tak dapat melihat dengan jelas. Penghasilan Adni tak tentu. Sebagai buruh tani di sawah atau kebun tetangga, paling banyak mengantongi Rp45.000 sehari. Musim panen barulah ia bisa meraup Rp100.000 per hari.

Kondisi serba memprihatinkan ini kerap mendorong para tetangga menjenguk sambil membawakan mereka sayuran, telur, sarden, dan mi instan. Terkadang mereka menerima sumbangan dari masjid. Demi bertahan hidup, Adni mengerjakan apapun

termasuk gotong-royong dan acara keagamaan dengan upah Rp10.000–Rp15.000. Namun pandemi COVID-19 menghentikan kegiatan-kegiatan ini. Adakalanya Adni terpaksa meminjam uang dari tetangga dan mengurangi jatah makannya.

Untungnya kisah tragis ini tak berlanjut.

Tahun 2018, Pemerintah Desa Suradadi membentuk Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja Adminduk) demi meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan. Pokja Adminduk Desa Suradadi beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari perangkat desa, kader posyandu, pemuda Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah mempermudah warga memperoleh surat-surat yang

disyaratkan untuk menerima BLT-Dana Desa.

Pemerintah Desa Suradadi memprioritaskan BLT-Dana Desa bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. ■

“Kami melibatkan Pokja Adminduk untuk mendata calon penerima BLT-Dana Desa sehingga tepat sasaran, apalagi penerimanya memang diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan miskin,” tegas Kepala Desa Suradadi, Yakim (52).

Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur, KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB

memfasilitasi pelatihan dan penyusunan protokol layanan Pokja Admindak. Rancangan protokol tersebut disampaikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur serta disosialisasikan pada Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD) dan Pokja Admindak masing-masing desa.

Pada April 2020, KOMPAK dan LPA NTB melatih para fasilitator Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) sehingga mereka dapat mendata seluruh warga yang menjadi calon penerima BLT-Dana Desa dengan lebih baik. Sebelum lahirnya LABKD, warga miskin dan rentan-lah yang harus secara aktif melaporkan diri, namun suara dari para lansia non-produktif jadi tidak terdengar (*silent group*).

KOMPAK dan LPA NTB juga memberi pendampingan asistensi dan konsultasi pelayanan admindak, menerbitkan buku tanya-jawab pelayanan admindak, serta memantau berkala pelaksanaan LABKD.

Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur, KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB memfasilitasi pelatihan dan penyusunan protokol layanan Pokja Admindak. ■



▲ Formulir kemudian diproses dan kurang dari lima jam KK dan KTP sudah selesai dan diantar kerumah mereka (foto diambil sebelum pandemi).

Dalam rangka membantu warga Desa Suradadi mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, Pokja Admindak melancarkan sejumlah jurus.

Pertama, “jemput bola” mendatangi langsung rumah-rumah warga, khususnya para penyandang disabilitas dan lansia. Pelayanan “jemput bola” ini tak hanya dilakukan untuk mengumpulkan berkas persyaratan namun juga saat merekam data e-KTP.

Kedua, mengumpulkan data secara kolektif melalui RT, Posyandu, dan PAUD.

Ketiga, mengumpulkan data secara langsung di desa segera setelah petugas melakukan sosialisasi mengenai persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan. Jurus ini biasanya menasar warga yang rumahnya berdekatan dengan kantor desa.

Proses pengurusan dokumen kependudukan Kartanah dan Sala dilakukan dengan cara pertama. Anggota Pokja Admindak mendatangi langsung kediaman mereka setelah sosialisasi. Semua proses dilakukan di rumah mulai dari membantu Kartanah dan Sala mengisi formulir biodata penduduk hingga perekaman data biometrik untuk e-KTP.

Formulir biodata penduduk mereka lantas diserahkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dukcapil Kecamatan Terara. Kurang dari lima jam kemudian, Kartanah dan sejumlah lansia lainnya menerima Kartu Keluarga (KK), e-KTP yang sudah selesai cetak diantar langsung ke rumah.

Sala memaparkan prosesnya yang sangat cepat dan mudah. Ia mengaku tak perlu keluar rumah sama sekali. Sejak pengurusan KK hingga pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa, anggota Pokja

Adminduk, PPKD, dan perangkat desa-lah yang bolak-balik mendatangi rumahnya.

“Baru kali ini pengurusan surat dibantu desa dan ibu-ibu Posyandu sebagai anggota Pokja Adminduk. Mudah dan tidak perlu bayar. Saya merasa dilayani. Zaman dulu, rasanya tidak mungkin pemerintah mau bantu urus-urus KTP dan KK, apalagi untuk saya yang sudah setua ini,” cetus Sala.

“Senang sekali. Seumur hidup, baru kali ini saya dapat bantuan pemerintah,” ujar Kartanah.

Setelah PPKD dan Pokja Adminduk Desa Suradadi mendampingi mereka mendapatkan dokumen kependudukan, Kartanah dan Sala akhirnya bisa memperoleh BLT-Dana Desa. Total bantuan Rp1.800.000 diberikan dalam tiga tahap penyaluran (Rp600.000 per tahap). Selain BLT-Dana Desa, Sala mengurus BPJS Kesehatan yang kini sering digunakannya untuk berobat ke Puskesmas.

“Senang sekali. Seumur hidup, baru kali ini saya dapat bantuan pemerintah,” ujar Kartanah.



▲ Dinas Dukcapil melalui Pokja Adminduk dan PPKD Desa Suradadi juga memfasilitasi warga disabilitas untuk memiliki dokumen kependudukan agar mendapat jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.

Namun, lima hari sebelum bantuan tahap ketiga disalurkan, Kartanah menghembuskan nafas terakhir. Penerimaan bantuan diwakilkan putrinya, Ruminah. “Saya bersyukur ibu meninggal dalam keadaan hatinya tenang dan bahagia karena telah mendapat haknya yaitu bantuan dari desa, juga sempat merasakan kemudahan berobat gratis ke Puskesmas. Ternyata masih ada yang mau membantu orang miskin, ikut meringankan beban hidup kami,” ucap Ruminah, terharu.

Menyaksikan langsung deretan manfaat yang diperoleh sejumlah warga setelah mengurus dokumen kependudukan, kini makin banyak warga Desa Suradadi yang antusias mendatangi

kantor desa tanpa diminta untuk membuat KTP dan KK. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Pokja Adminduk tetap memberi pelayanan terbaik sehingga warga bisa segera mengakses bantuan tunai tanpa kendala.

“Baru kali ini pengurusan surat dibantu desa dan ibu-ibu Posyandu sebagai anggota Pokja Adminduk. Mudah dan tidak perlu bayar. Saya merasa dilayani. Zaman dulu, rasanya tidak mungkin pemerintah mau bantu urus-urus KTP dan KK, apalagi untuk saya yang sudah setua ini,” cetus Sala.

Dukcapil MENGGOMBAL, Gerbang Masa Depan Bantaeng



Pelaksanaan inovasi Dukcapil MENGGOMBAL mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan anak berkat kolaborasi ▲ antara dinas kesehatan, pemerintah desa, koordukcapil, serta bidan desa.

Akta Kelahiran merupakan dokumen penting bagi masa depan anak. Akta Kelahiran menjadi syarat mengurus dokumen lain dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Rumitnya prosedur pengurusan dokumen kependudukan selama ini mendorong Kabupaten Bantaeng menggagas Dukcapil MENGGOMBAL (Membangun Gerakan Orangtua Membuat Akta Kelahiran). Inovasi layanan adminduk yang berjalan sejak 2019 ini berkolaborasi dengan puskesmas, pemerintah desa, bidan, dan kader posyandu. Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) pun meningkat sebesar 6% dan 12% dalam setahun.

Sulastri Eka Wati (35) nyaris putus asa mengurus Akta Kelahiran putri bungsunya, Aurilya Ramadani (1). Sejak kembali dari Kolaka di Sulawesi Tenggara, ke Bantaeng di Sulawesi Selatan, ibu rumah tangga dengan tiga anak ini mati-matian memperjuangkan terbitnya Akta Kelahiran Aurilya. Sulastri sadar bahwa Akta Kelahiran adalah kunci penting bagi masa depan buah hatinya, namun entah mengapa proses mengurusnya sungguh berbelit-belit. Meski proses ini telah menguras isi kantong, hasilnya tetap nihil.

Seorang tetangga pernah menawarkan diri membantu, tetapi meminta biaya Rp500.000, jumlah yang tak sanggup Sulastri penuhi. Suaminya hanya seorang buruh bangunan yang penghasilannya tak tentu. Sulastri pun tinggal bersama saudaranya yang tidak memiliki pekerjaan.

Titik terang muncul ketika suatu hari Sulastrri membawa anak-anaknya melakukan pemeriksaan kesehatan di Posyandu. Ia berjumpa dengan Ernawati (52), staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang tengah melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA melalui inovasi layanan adminduk, Dukcapil MENGGOMBAL.

Tanpa ragu, Sulastrri bersama tiga ibu lainnya segera melengkapi berkas persyaratan yakni Kartu Keluarga (KK) dan keterangan lahir dari bidan. Tiga hari kemudian, Sulastrri menerima Akta Kelahiran Aurilya yang diantar langsung ke rumahnya—tanpa sedikit pun mengeluarkan biaya.

“Saya berjuang supaya Aurilya bisa mendapatkan Akta Kelahiran karena nanti harus dipakai sekolah atau berobat. Anak tidak bisa sekolah gratis kalau tidak punya Akta Kelahiran. Anak pertama saya kelas 2 SD dan bisa sekolah gratis. Aurilya akan masuk TK dan karena sudah punya Akta Kelahiran, prosesnya pasti mudah. Saya bahagia sekali,” ucap Sulastrri.

Dukcapil MENGGOMBAL merupakan inovasi dari Dukcapil Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan KOMPAK. Tokoh pencetusnya adalah Noptiadi (34) Kabid Pencatatan Kelahiran Dukcapil. Noptiadi sangat memahami kesulitan yang dihadapi warga akibat tidak memiliki dokumen tersebut.



▲ Kader Posyandu akan memfasilitasi kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA tanpa biaya.

“Banyak warga tidak bisa mendaftar di universitas maupun mencari pekerjaan karena tak punya Akta Kelahiran atau karena Akta Kelahirannya penuh kekeliruan. Oleh karena itu, saya merasa Dukcapil seharusnya mengurai permasalahan mulai dari level paling dasar. Salah satunya dengan melibatkan Puskesmas/ Poskesdes dan Posyandu, tempat para ibu melahirkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya,” jelas Noptiadi.

KOMPAK mendukung penuh inovasi layanan adminduk Dukcapil MENGGOMBAL. Untuk membantu Dukcapil Kabupaten Bantaeng meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan inovasi layanan adminduk ini, KOMPAK mendampingi Dukcapil melakukan pemetaan capaian dokumen adminduk, kendala, dan solusinya. Dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan masyarakat, KOMPAK turut mendampingi Dukcapil menyusun mekanisme pengelolaan aduan.



Capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantaeng untuk kelompok usia 0–18 tahun periode 2020 tercatat sebesar 93%, serta kenaikan 5 kali lipat untuk kepemilikan KIA. ▲

KOMPAK juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis terkait layanan adminduk seperti SOP pelayanan, panduan pelatihan bagi para pelatih, manajemen pembiayaan, dan sebagainya yang diikuti oleh staf Dukcapil, staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memfasilitasi pengurusan dokumen adminduk yang lebih baik dan efisien, KOMPAK turut membidani lahirnya Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Koordukcapil) di tingkat Desa/Kelurahan. KOMPAK membekali Koordukcapil dengan aneka modul pelatihan dan buku saku, petunjuk teknis Layanan Administrasi Penduduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi, serta SOP mekanisme koordinasi Dukcapil.

Dalam rangka meningkatkan cakupan dokumen adminduk, KOMPAK mendorong kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memfasilitasi penyusunan kebijakan yang partisipatif dalam Peraturan Bupati, Surat Edaran Bupati, dan sebagainya. Demi memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, KOMPAK memfasilitasi diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan berbagai Dinas dan Kementerian, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, serta tim Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk bagi Masyarakat Rentan dan



Dengan memiliki akta kelahiran, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengakses layanan pendidikan secara gratis. ▲

Kelompok Khusus di Kabupaten Bantaeng.

Sebelum inovasi layanan adminduk Dukcapil MENGGOMBAL diluncurkan tahun 2019, masih banyak masyarakat yang belum melengkapi dokumen kependudukan anak-anak mereka—khususnya di wilayah pesisir dan pelosok desa. Sebagian lainnya sudah berupaya mengurus dokumen, tapi merasa prosesnya terlalu rumit dan menyulitkan karena makan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Noptiadi, pendekatan “jemput bola” melalui pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat merupakan cara yang jauh lebih efektif untuk menjangkau warga. Para kader Puskesmas/ Poskesdes dan Posyandu dilibatkan sehingga mereka bisa sekaligus mengedukasi orang tua mengenai pentingnya mengurus Akta Kelahiran dan KIA bagi anak-anak mereka.

Para kader yang bekerjasama dengan Dukcapil Bantaeng juga mengaktifkan pelayanan *three in one*: Pertama, melakukan sosialisasi terkait administrasi kependudukan dan regulasi-regulasi terkait lainnya. Kedua, membuka layanan pendaftaran penerbitan Akta Kelahiran dan KIA di Posyandu. Terakhir, memastikan terbitnya Akta Kelahiran dan KIA dan mengantarnya ke rumah masing-masing.

Ernawati, staf Dukcapil yang membantu Sulastri mengurus Akta Kelahiran bagi putri bungsunya, mengungkapkan bahwa materi-materi tentang dokumen kependudukan selalu disampaikan dalam rangkaian kegiatan *refreshing* kader Posyandu dan lokakarya mini bulanan bidan desa. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para kader dalam mendorong warga mengurus dokumen kependudukan.

“Banyak warga menunda pengurusan Akta Kelahiran karena tidak mengerti cara mengurusnya, jarak yang terlalu jauh dengan kantor Dukcapil, juga munculnya anggapan bahwa proses pengurusan dokumen pasti menguras biaya. Saya selalu mendorong para kader untuk menyampaikan pada warga bahwa pengurusan Akta Kelahiran dan KIA tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis,” terang Ernawati.

Selain sosialisasi di Posyandu, para kader juga melakukan pemutakhiran data dengan menyambangi langsung rumah-rumah warga. Mereka antara lain mendata jumlah ibu hamil, ibu yang baru melahirkan (masa nifas), bayi dan balita, lansia, serta penyandang disabilitas. Proses pendataan ini memudahkan para kader mengidentifikasi keluarga yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Proses pendataan juga membantu Dukcapil mengidentifikasi kelompok rentan (lansia, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas) yang belum memiliki dokumen kependudukan. Setelah teridentifikasi, koordinator Dukcapil membantu mereka mengurus dokumen kependudukan di kantor Dukcapil hingga tuntas.

Kepala Puskesmas Bissappu, Akbar Arfah (48), mengakui bahwa pendekatan ini memang terbukti efektif mendorong warga mengurus dokumen kependudukan mereka.



Melalui Dukcapil MENGGOMBAL, Pemkab Bantaeng mendorong kesadaran orang tua dalam kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. ▲

“Kader Posyandu selalu mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan pada setiap pertemuan ibu dan balita di Posyandu. Pada umumnya orang tua senang karena tidak perlu repot-repot ke kantor Dukcapil sehingga langsung bersedia melanjutkan proses pengajuan,” kata Akbar.

Laporan Kinerja Dukcapil Kabupaten Bantaeng November 2020 mengonfirmasi temuan Akbar. Capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantaeng untuk kelompok usia 0–18 tahun periode 2020 tercatat sebesar 93%, lebih tinggi dibandingkan periode 2019 yang mencapai 87%. Angka ini melampaui target nasional sebesar 92%. Demikian pula KIA yang pada 2020 telah mencapai 15%, meningkat cukup drastis dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 3%.

Selain itu, makin banyak warga berinisiatif melaporkan kelompok masyarakat rentan yang belum punya dokumen kependudukan. Kemudahan proses pengurusan dan berbagai manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang mendorong inisiatif sejumlah warga –termasuk Sulastri –ikut aktif mengajak dan mendampingi warga lainnya yang belum memiliki dokumen kependudukan.

“Dukcapil MENGGOMBAL sangat bermanfaat, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Program ini tersedia di Posyandu, gratis, dan proses mengurusnya mudah. Saya sendiri sudah merasakannya. Itu sebabnya saya bersemangat memotivasi ibu-ibu lainnya supaya mereka juga ikut mengurus Akta Kelahiran dan KIA bagi anak-anaknya,” papar Sulastri.

GERTAK dan Asa Baru Jumali-Hasna



Petugas Disdukcapil Pangkep melayani warga yang mengurus dokumen kependudukan. ▲

Bentang alam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menantang menjadi salah satu faktor rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan. Padahal, banyak warga membutuhkannya sebagai syarat pengajuan bantuan sosial –seperti yang dialami pasangan Jumali dan Hasna. Inisiatif Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (GERTAK) yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangkep bersama KOMPAK berkontribusi meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen penduduk secara signifikan. Harapan baru bagi warga Pangkep yang akhirnya dapat menerima berbagai jenis bantuan sosial.

Lima belas tahun merantau di Malaysia, suami-istri Jumali (60) dan Hasna (59) kembali ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Nahasnya, Jumali menderita sakit yang membuatnya terbaring di rumah sementara Hasna hanya menjadi petani penggarap sawah orang lain. Dengan penghasilan sangat minim, mereka tak mampu membangun rumah tinggal yang layak.

Kondisi memprihatinkan tersebut membuat pasangan ini memenuhi syarat untuk mendapatkan berbagai jenis bantuan sosial dari Pemerintah Desa. Masalahnya, identitas mereka tidak muncul di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Pangkep. Keduanya terkejut mengingat KTP yang sama dapat digunakan untuk mendaftar Pilpres di KBRI negeri jiran.

Kepala dusun cepat tanggap melaporkan kasus ini pada kepala desa yang segera menginformasikan pegawai Disdukcapil untuk membantu pasangan ini mengurus KK dan KTP baru.

Melalui program GERTAK, petugas Disdukcapil bergegas mengantar pasangan yang telah 32 tahun menikah ini ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pangkep. Perekaman eKTP dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan terverifikasi. Jumali dan Hasna berhasil membawa pulang KK hari itu juga. Keesokan harinya, mereka sudah mengantongi eKTP. Seluruh proses pengurusan dokumen kependudukan ini tanpa pungutan biaya sama sekali.

Berbekal KK dan KTP baru, kepala dusun mendaftarkan Jumali dan Hasna sebagai calon penerima BLT Dana Desa dan asuransi kesehatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial (BPJS). Mereka akhirnya menerima BLT-Dana Desa Panaikang bulan itu juga (Mei 2021).

GERTAK mempercepat proses kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan terpadu.

Jumali dan Hasna bukan satu-satunya masyarakat yang menerima manfaat dari hadirnya GERTAK. Program yang diinisiasi sejak 2017 oleh Disdukcapil Kabupaten Pangkep bersama KOMPAK ini berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen secara signifikan. Akta Kelahiran mencapai 92% (2021) dari sebelumnya 48% (2017), eKTP mencapai 86% (2021) dari 46% (Mei 2017), sedangkan KK mencapai 96% (2021) dari 82% (2017).

Inisiatif GERTAK yang bertujuan mempercepat proses kepemilikan dokumen

kependudukan melalui layanan terpadu ini menerbitkan harapan baru bagi masyarakat Pangkep yang selama ini kesulitan mengurus dokumen karena faktor finansial dan geografis.

Kondisi geografis Pangkep yang meliputi daratan, kepulauan, dan pegunungan menyulitkan warga mengurus dokumen kependudukan. Jarak tempuh yang panjang, akses transportasi yang sangat terbatas, dan tingginya biaya yang diperlukan untuk mendatangi kantor Disdukcapil di ibukota kabupaten membuat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sebelum hadirnya GERTAK masih tergolong rendah. Kebanyakan warga baru bersedia mengurus dokumen kependudukan hanya jika ada kebutuhan mendesak.

Salah satu pemicu keberhasilan inisiatif GERTAK adalah model pendekatan kerjanya yang bersifat “jemput bola” sehingga masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh menyambangi kantor Disdukcapil.

Inisiatif GERTAK yang bertujuan mempercepat proses kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan terpadu ini menerbitkan harapan baru bagi masyarakat Pangkep yang selama ini kesulitan mengurus dokumen karena faktor finansial dan geografis.



Disdukcapil Pangkep melakukan perekaman data di SMA Negeri 20 di Pangkep. Kegiatan ini merupakan bagian dari program GERTAK Pangkep (foto diambil sebelum pandemi).



GERTAK berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran menjadi 92% pada 2021. ▲

Selain pelayanan keliling seperti yang diberikan terhadap Jumali dan Hasna, GERTAK membuka jalur pelayanan lewat sekolah dan Lembaga Pemasarakatan, juga *night service* yang beroperasi hingga pukul 12 malam mengingat sebagian besar warga adalah nelayan yang hanya punya waktu luang pada malam hari. GERTAK pun sempat membuka layanan daring Agen Capil *Online* (ACO) yang sejak tahun 2020 melebur dengan layanan daring dari Kementerian Dalam Negeri.

“Selain kerja sama dengan sekolah untuk mengakomodasi pemenuhan Kartu Identitas Anak atau KIA, kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menggagas Gerakan Lahir Bersama Akta atau GELAR BERSAMATA untuk memastikan semua bayi yang baru lahir memperoleh Akta Kelahiran sebelum dipulangkan dari fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan desa dibekali pengetahuan mengenai syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan untuk menerbitkan Akta Kelahiran,” jelas Ahmad

Dian, Plt. Kadis Disdukcapil Kabupaten Pangkep.

Di samping upaya “jemput bola” dan jejaring kerjasama lintas bidang, keberhasilan GERTAK tak lepas dari solidnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta peran desa dan kecamatan yang aktif mendorong masyarakat memiliki dokumen kependudukan. Selain peran aktif Kepala Desa Panaikang mendampingi Jumali dan Hasna, tokoh desa lainnya juga konsisten membantu warganya.

Tokoh masyarakat Desa Mandalle, Andi Rifai (49), misalnya. Jarak tempuh dari ibukota Desa Mandalle ke kantor Disdukcapil yang memakan waktu satu jam perjalanan darat dengan motor (jika tidak macet), membuat warga enggan mengurus data kependudukan. Pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Mandalle, Andi tak jemu membujuk warga mengurus dokumen penduduk hingga ke masjid-masjid.

Demikian pula Saharia (27) yang mengemban amanat sebagai Koordinator Dukcapil Desa Mattiro Baji. Saharia telaten berkeliling mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dan membujuk mereka untuk mengurusnya. Saharia juga aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil dan kepala desa supaya warga yang bersedia mengurus dokumen bisa segera dilayani dengan baik.

Di samping upaya “jemput bola” dan jejaring kerjasama lintas bidang, keberhasilan GERTAK tak lepas dari solidnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta peran desa dan kecamatan yang aktif mendorong masyarakat memiliki dokumen kependudukan. ■

“Melalui pelayanan keliling dan pelayanan malam, makin banyak masyarakat yang tergerak untuk mengurus dokumen kependudukan karena jarak dan waktu sudah tak jadi masalah lagi,” terang Saharia.

Andi Rifai, Saharia, dan para tokoh masyarakat lainnya menyadari bahwa kepemilikan dokumen kependudukan akan meningkatkan peluang warganya menerima beragam jenis bantuan sosial pemerintah, terlebih bagi mereka yang benar-benar dilanda kesulitan seperti Jumali dan Hasna.

Kepemilikan dokumen kependudukan mempermudah pemerintah daerah melakukan penyalarsan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bantuan sosial diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Data kependudukan yang mutakhir dan akurat juga sangat krusial sebagai salah satu bahan pertimbangan utama dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah yang hasil akhirnya akan dirasakan warga.

Kepemilikan dokumen kependudukan mempermudah pemerintah daerah melakukan penyalarsan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bantuan sosial diharapkan bisa lebih tepat sasaran. ■

“Terlepas dari persoalan rezeki masing-masing orang, beberapa warga hidupnya membaik setelah mengurus administrasi penduduk karena dokumen penduduk adalah syarat utama mendapatkan bantuan sosial, juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ucap Saharia.

Senada dengan Saharia, Jumali dan Hasna merasakan perbaikan kualitas hidup setelah mengurus dokumen kependudukan dan menerima bantuan sosial. Meski kesulitan hidup tak serta-merta lenyap sepenuhnya, inisiatif GERTAK setidaknya telah menumbuhkan

harapan baru. Mereka tahu bahwa masih ada yang peduli dan mengulurkan tangan untuk sedikit meringankan penderitaan mereka.

“Dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang dan suami sakit sehingga tidak bisa bekerja, BLT Dana Desa yang kami peroleh sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” papar Hasna.

Data kependudukan yang mutakhir dan akurat juga sangat krusial sebagai salah satu bahan pertimbangan utama dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah yang hasil akhirnya akan dirasakan warga. ■

Perekaman data di SMA Negeri 20 di Pangkep, bagian dari program GERTAK Pangkep (foto diambil sebelum pandemi). ▼



Identitas Hukum, Kunci Pengentasan Kemiskinan Melalui Akses Layanan Dasar



Pasangan Sangen dan Ahadi dengan bayinya yang baru lahir (Foto: KOMPAK) ▲

Sangen, perempuan penduduk Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, akan melahirkan. Suaminya, Ahadi dan anggota keluarga lainnya membawanya ke Puskesmas Bayan. Ia telah diperingatkan bahwa ia mengandung bayi berisiko tinggi, sehingga ia disarankan untuk mengurus BPJS Kesehatan (skema asuransi pemerintah) untuk mengantisipasi biaya-biaya perawatan apa pun yang diperlukan setelah melahirkan.

Sangen melahirkan Kamarsah pada Juni 2016. Kamarsah lahir dengan berat badan rendah dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung di Lombok Utara untuk perawatan lanjutan. Kamarsah dirawat selama 22 hari dalam sebuah inkubator.

Sangen dan Ahadi adalah pasangan muda yang telah menikah selama setahun. Pasangan yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal ini tinggal bersama Jumenah, ibu dari Ahadi, dalam rumah seluas 3x6 meter yang terbuat dari anyaman bambu dan lantai tanah. Ahadi adalah seorang petani yang menanam jagung sekali setahun selama musim hujan. Sekali panen, ia berpenghasilan Rp2,5 juta, yang kemudian ia gunakan untuk membeli bibit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama setahun penuh. Ahadi tidak akan mungkin bisa membayar perawatan intensif Kamarsah yang berbiaya Rp6,8 juta.

Pasangan ini tidak memiliki kartu keluarga (KK) ataupun kartu tanda penduduk (KTP), dua dokumen yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan BPJS guna membantu mereka membiayai perawatan pasca kelahiran. Mempunyai identitas hukum bukan prioritas bagi Ahadi dan Sangen. Mereka bukan hanya tidak menyadari manfaat memiliki identitas hukum untuk menerima layanan dasar, tetapi Ahadi juga menemui halangan dalam memperoleh dokumen-dokumen tersebut. "Jauh, satu jam naik motor. Saya tidak punya motor. Ongkos pulang pergi naik ojek seharga Rp100 ribu, dan dokumen tidak akan selesai dalam waktu sehari. Saya harus datang berulang kali, itu pun belum tentu selesai," ujar Ahadi.

Cerita Adzam

Adzam Riski adalah satu di antara 50,9% anak-anak di Lombok Utara yang kesulitan mengakses layanan dasar karena tersandung masalah kepemilikan identitas hukum. Seperti Ahadi dan keluarganya, pengalaman Adzam pun serupa. Setahun sejak kawan-kawannya mulai sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pemenang Timur, Adzam masih belum dapat sekolah. Suatu hari ia bilang ke ibunya, "Saya mau sekolah, Mak," isaknya.

Ibu Adzam, Maskiah, adalah seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengangkut pasir. Karena kurangnya

informasi, ia tidak sadar bahwa KK perlu diperbarui dengan namanya sebagai kepala keluarga sejak bercerai dengan suaminya tujuh tahun lalu. Oleh karena ia tidak punya KK, Maskiah tidak mendaftarkan kelahiran Adzam. Ia kemudian memutuskan untuk tidak menyekolahkan Adzam karena Adzam tidak punya akta kelahiran, yang merupakan persyaratan administratif untuk pendaftaran sekolah.

Termotivasi oleh hasrat Adzam bersekolah, Maskiah mendaftarkan Adzam dengan menggunakan surat keterangan lahir (SKL) yang diterbitkan oleh Puskesmas tempat Adzam lahir) dan formulir KK. Setelah melalui proses tersebut, Adzam sudah dapat ikut mengenyam pendidikan di SDN 3 Pamenang Timur seperti teman-temannya yang lain. Namun ternyata SKL hanyalah solusi sementara. Adzam diberikan waktu satu bulan untuk menyerahkan akta kelahiran dan KK untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Adzam dan Kamarsah mewakili sekitar 30 ribu anak di Lombok Utara yang kesulitan mengakses layanan dasar karena ketiadaan dokumen-dokumen identitas hukum. Di Lombok Utara hanya 49,1% anak usia 0-17 tahun yang mempunyai akta kelahiran.

Gerakan 100% Akta Kelahiran untuk Para Siswa Lombok Utara

Jarangnya kepemilikan akta kelahiran banyak ditemukan di antara masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak kesulitan bagi mereka untuk memperoleh akses ke layanan dasar. Sampai hari ini, hanya setengah dari anak Indonesia (di bawah usia 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran, berarti sekitar 40 juta kelahiran tidak tercatat. Pemerintah bermaksud meningkatkan kepemilikan akta kelahiran untuk anak dari 56% (SUSENAS 2014) ke 85% pada tahun 2019.

KOMPAK telah mendukung Lombok Utara dalam meningkatkan dan mempercepat layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum untuk orang miskin.

Untuk memenuhi hak atas identitas hukum dan layanan dasar, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, meluncurkan Gerakan 100% Akta Kelahiran untuk Para Siswa di Lombok Utara. KOMPAK telah mendukung Lombok Utara dalam meningkatkan dan mempercepat layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum untuk orang miskin. Tidak hanya di Kabupaten Lombok Utara,

kantor cabang KOMPAK di Nusa Tenggara Barat juga akan mendukung Pemerintah Daerah di Bima, Sumbawa dan Lombok Timur untuk memastikan hak-hak administrasi kependudukan, khususnya pencatatan kelahiran, untuk memberikan akses ke layanan dasar.

Identitas hukum adalah produk Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) dan bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen identitas hukum dan mendorong pemanfaatan data statistik hayati untuk perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan sasaran pemerintah sebagaimana disebutkan dalam RPJMN yang berfokus pada penguatan kualitas layanan dasar. Dalam hal ini, identitas hukum menjadi pintu masuk bagi layanan dasar.

Sinergi Pemerintah Indonesia di Tingkat Pusat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah meluncurkan kajian, 'Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia'. Dalam peluncuran tersebut, Bappenas Kegiatan memberikan sosialisasi atas temuan dan rencana program untuk melembagakan identitas hukum dan sistem PASH untuk layanan dasar.

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2016 dengan dukungan Pemerintah Australia melalui KOMPAK dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) dengan suatu penelitian yang dilakukan di tingkat kabupaten di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Penelitian yang menganalisis hambatan dan peluang dalam pencatatan kelahiran dan kematian ini bertujuan untuk memberikan bukti tentang hambatan, kesenjangan, kekuatan dan peluang dalam sistem yang ada, serta mengidentifikasi model dari berbagai negara yang dapat dibandingkan dengan model Indonesia agar dapat menjadi dasar untuk penyelesaian masalah PASH yang tepat.

Selain meluncurkan laporan, acara ini juga bertujuan untuk memperoleh umpan balik tentang temuan-temuan yang terkait dengan pencatatan sipil, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, serta mencari masukan tentang peran kecamatan dan desa dalam menyediakan layanan identitas hukum, pencatatan sipil dan statistik hayati. Acara ini mengundang perwakilan dari kementerian-kementerian terkait, pemerintah lokal tempat penelitian dilakukan, universitas,

lembaga penelitian, mitra pembangunan serta organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh masukan mereka tentang pendekatan-pendekatan yang efektif, serta arahan proses perencanaan kebijakan dalam konteks meningkatkan kepemilikan identitas hukum dan memperkuat pencatatan sipil dan statistik hayati melalui layanan dasar.

Menurut Dra. Rahma Iryanti, Deputy Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, "Perlu kerja sama yang erat antar sektor, dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengorganisir layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sektor bantuan dan perlindungan sosial. Penguatan kerja sama secara vertikal juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan dinamis untuk perencanaan program pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Dengan sistem PASH yang baik, pemerintah dapat lebih mudah mengukur efektivitas kebijakan dan program yang telah dibuat".

Mengembalikan Senyum Di Bibir Inak Hafazah



Pokja Adminduk Desa Kalijaga Timur telah membantu pengurusan 1.333 dokumen kependudukan. Diantaranya kepada keluarga Hafazah dan Artik anaknya ▲ yang penyandang disabilitas mental akhirnya memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP.

Hafazah (50) tinggal bersama kedua buah hatinya, Artik dan Nur Asyiah di Desa Kalijaga Timur, Kabupaten Lombok Timur. Sehari-hari, Hafazah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp50.000 per hari.

Putranya Artik adalah penyandang disabilitas mental atau disebut juga sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Jika sakitnya kambuh, Artik seringkali merusak barang milik tetangganya.

Warga sudah meminta Hafazah untuk membawa Artik berobat ke Mataram.

Namun karena terbentur biaya, ia mengurungkan niatnya.

Menurut Mariani, Kader Posyandu Kalijaga Timur, sebagian besar penduduk Desa Kalijaga Timur tidak dapat mengakses layanan dasar dan program perlindungan sosial lantaran tidak memiliki dokumen kependudukan.

Pada Juni 2017, Desa Kalijaga Timur dengan dukungan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dan KOMPAK membentuk Kelompok Kerja untuk Administrasi Kependudukan atau Pokja Adminduk membantu masyarakat mengurus dokumen kependudukan sekaligus memberi pemahaman tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Pembentukan Pokja Adminduk ini merupakan hasil terbitnya Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Desa/Masyarakat, dimana KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB berperan memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan peraturan bupati ini hingga pengesahannya.¹

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, Sateriadi mengatakan bahwa Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) melalui pembentukan Pokja Adminduk memperlancar tugasnya untuk memberikan layanan adminduk kepada masyarakat, khususnya mereka yang miskin dan rentan. ■

Sampai saat ini, Pokja Adminduk Desa Kalijaga Timur telah membantu pengurusan 1.333 dokumen kependudukan. Diantaranya ada Hafazah dan Artik yang akhirnya memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP.

Berbekal kelengkapan dokumen adminduk ini Hafazah bisa membawa Artik berobat ke RSJ Mutiara Sukma di Mataram sementara biaya transportasi ditanggung APBDes. Keluarga mereka pun dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) lansia dari Kementerian Sosial.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, Sateriadi mengatakan bahwa Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) melalui pembentukan Pokja Adminduk memperlancar tugasnya untuk memberikan layanan adminduk kepada masyarakat, khususnya mereka yang miskin dan rentan.

“Saat ini banyak masyarakat lanjut usia, disabilitas, dan bekas pekerja migran yang mengurus dokumen kependudukannya. Ini karena mereka sudah tahu manfaatnya selain proses pengurusannya yang berjalan lebih cepat,” terang Sateriadi.

¹ Peraturan Bupati ini telah direvisi menjadi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Desa/Masyarakat.

Layanan Dasar Bagi Sari



Sari (70). didampingi Ernawati Ramli, Koordukcapil Desa Rappoa, yang membantu mengurus dokumen kependudukan agar dapat menerima tunjangan lansia. ▲

Warga Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan kini telah dapat mengakses layanan dasar sesuai standar pelayanan minimum dari pemerintah. Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) yang diadopsi pemerintah desa dengan dukungan KOMPAK, memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan di desanya, yang menjadi syarat untuk mengakses layanan kesehatan serta berbagai bantuan pemerintah. Data kependudukan yang lengkap juga berarti pembangunan dan anggaran layanan dasar dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan warga desa.

Di depan rumah kayunya yang berukuran 4 x 7 meter, Sari (70) mengikat bibit-bibit rumput laut pada seutas tali. Sejak suaminya meninggal, warga Dusun Bo'dong, Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini memang mengandalkan pekerjaan mengikat bentangan rumput laut untuk menghidupi diri beserta anaknya, Rabbele (22), dan cucunya, Ilham (11).

Dari pekerjaan mengikat bentangan rumput laut tiga hingga empat kali sebulan, Sari mendapatkan upah Rp2.500 per bentang, yang panjangnya antara 4 hingga 5 meter. "Karena saya sakit, jadi paling banyak saya hanya bisa ikat 10 bentang saja," tutur Ibu Sari yang sebelah matanya kini tidak dapat melihat lagi. Rabbele yang menyandang disabilitas fisik tangan mengecil juga tidak memiliki pekerjaan tetap.

Selama ini keluarga Sari tidak terdaftar dalam program perlindungan sosial manapun karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan. Namun pada tahun 2018, dibantu Ernawati Ramli, Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Koordukcapil) Desa Rappoa, Sari telah memiliki dokumen kependudukan sehingga dapat menerima tunjangan lansia dari desa. "Saya bersyukur dengan ada dokumen, saya bisa mendapat bantuan dari pemerintah," ujarnya saat menerima bantuan untuk pertama kalinya.

"Saya bersyukur dengan ada dokumen, saya bisa mendapat bantuan dari pemerintah," ujar Sari, warga Dusun Bo'dong, Desa Rappoa, saat menerima bantuan untuk pertama kalinya.

Setiap bulannya ia menerima 10 liter beras, 2 papan telur, 2 liter minyak kelapa, dan 2 kilogram gula pasir untuk kebutuhan sehari-hari. Sari yang seumur hidupnya hanya mengandalkan obat tradisional jika sakit kini juga dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, baik di Puskesmas, rumah sakit, maupun praktik dokter swasta karena telah memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Sari adalah satu dari 152 warga anggota kelompok rentan Desa Rappoa yang akhirnya bisa mempunyai dokumen



Staf Koordukcapil, Ernawati akan mengurus dokumen persyaratan adminduk untuk diproses lebih lanjut, dan berkeliling desa setiap hari Jumat dan Sabtu untuk mengumpulkan dan memperkenalkan program LABKD dan manfaatnya di seluruh dusun. ▲

kependudukan sehingga bisa mendapatkan layanan dasar, sejak pemerintah Desa Rappoa mengadopsi Fasilitas Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) pada tahun 2018.

Dengan adanya FPLKD, masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan di desanya, tanpa harus pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Desa Rappoa menyusun mekanisme FPLKD dan menunjuk fasilitator administrasi kependudukan atau Koordukcapil bersama KOMPAK.

"Sebelum ada FPLKD, banyak warga kami khususnya yang miskin dan rentan tidak dapat mengakses program perlindungan sosial seperti tunjangan lansia, Program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Non Tunai dari Dinas

Sosial," tutur Irwan Darpin, Kepala Desa Rappoa. Warga tidak bisa mengakses layanan pemerintah karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Berbagai aturan pemerintah mensyaratkan dokumen-dokumen ini agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dasar.

Sementara itu, rumitnya proses serta persyaratan yang diperlukan membuat warga enggan mengurus dokumen kependudukan. "Dari Desa Rappoa ke sini misalnya, butuh biaya minimal 10 ribu per orang, atau 20 ribu pergilang. Padahal setidaknya mereka harus dua kali datang, untuk menyerahkan berkas dan mengambil dokumen," tutur Selfi Ahmaniarti Niswar, Operator Disdukcapil Kabupaten Bantaeng.



Kini, seluruh 46 desa dan 21 kelurahan di delapan kecamatan Kabupaten Bantaeng telah mengadopsi LABKD.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan semakin menambah keengganan warga. "Saya kan orang miskin. Buat apa orang miskin punya Akta Kelahiran?" tanya Sari sebelum mendapat penjelasan dari Ernawati bahwa Akta Kelahiran adalah syarat pembuatan KK dan KTP yang memungkinkannya terdaftar sebagai penerima tunjangan lansia dari desa.

Ibu Ernawati segera melaksanakan tugasnya. Ia berkunjung dari dusun ke dusun untuk mendata dan melakukan sosialisasi, termasuk dalam acara informal seperti kegiatan Posyandu, pengajian, acara pernikahan, arisan, pertemuan orang tua murid di sekolah maupun di Puskesmas. Warga asli Rappoa ini menggunakan bahasa Makassar yang mudah dipahami warga setempat untuk menjelaskan manfaat memiliki dokumen kependudukan, seperti dapat mengurus BPJS,

berobat gratis di dokter praktik mandiri, atau diusulkan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Warga kemudian hanya perlu menyerahkan berkas kependudukannya kepada Ibu Ernawati untuk dibantu pengurusannya lebih lanjut. Mengurus dokumen kependudukan yang tadinya memakan waktu sehari-hari, kini bisa selesai dalam waktu 10 menit, kecuali pembuatan KTP elektronik yang memerlukan perekaman biometrik.

Masa pandemi COVID-19-pun tidak menghentikan langkah Ibu Ernawati. "Sosialisasi dilakukan melalui media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*. Sementara layanan adminduk juga dilakukan secara *online* melalui *WhatsApp*," jelas Ibu Ernawati.

Ibu Ernawati mengalokasikan hari Jumat dan Sabtu pukul 08.00 hingga 12.00 untuk melaksanakan tugas sebagai

Koordukcapil, karena ia harus menjalankan tugas sebagai Kasi Pemerintahan pada Senin hingga Kamis pukul 08.00 hingga 14.00.

"Namun jadwal ini bisa berubah jika ada kasus-kasus penting dan mendesak, misalnya ada yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk mengurus BPJS, sementara pasien sudah atau akan mendapat perawatan medis di puskesmas atau rumah sakit," jelas ibu dari tiga putra yang berusaha mengalokasikan hari Minggu untuk keluarga.

Mengurus dokumen kependudukan yang tadinya memakan waktu sehari-hari, kini bisa selesai dalam waktu 10 menit. ■

Kerja keras Ibu Ernawati dan para perangkat desa membuahkan hasil. Sejak dimulainya FPLKD hingga 2020, 85% warga Rappoa telah memiliki Akta Kelahiran dari hanya 40% di tahun 2017. Demikian juga pemilik KTP meningkat menjadi 90% dan KK meningkat menjadi 95%, dari hanya 60% di tahun 2017.

Dengan lengkapnya dokumen kependudukan, mereka bisa mendapatkan berbagai bantuan, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Desa, Pelayanan Kesehatan Gratis/ BPJS, Kesehatan Gratis Desa, Bantuan Sembako Lansia,

Bantuan Sosial Tunai, hingga bantuan baju seragam anak sekolah.

Masyarakat Rappoa pun bisa berobat gratis hanya dengan membawa KTP dan KK, karena sejak 2018 Pemerintah Desa Rappoa sudah membuat nota kesepahaman dengan satu dokter umum dan satu dokter gigi di Rappoa untuk membuka praktik mandiri di rumah.

“Warga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, yang tadinya tidak bisa melakukan pengobatan karena ketiadaan dokumen, saat ini sudah rajin melakukan pengobatan karena gratis di Puskesmas dan rumah sakit,” tutur Ernawati tentang hal yang membuatnya merasa kerja kerasnya terbayar.

Data kependudukan yang akurat juga bermanfaat ketika pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Ikhsan Ismail (44), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencontohkan jika desa mempunyai rencana program beasiswa bagi anak sekolah.

“Program ini membutuhkan data anak usia sekolah, seperti jumlah, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan sebagainya,” jelas Pak Ikhsan. “Data adalah dasar perencanaan dan penganggaran. Tanpa data yang akurat mustahil bagi pemerintah desa memberikan layanan berkualitas sesuai SPM,” tandas pria yang sehari-harinya adalah guru ilmu sosial di SMP 2 Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.

Kini, seluruh 46 desa dan 21 kelurahan di delapan kecamatan Kabupaten Bantaeng telah mengadopsi FPLKD. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk bagi Masyarakat Rentan Adminduk dan Masyarakat Khusus Melalui Pelibatan Koordukcapil dan Pemerintah Desa.

Seluruh warga Bantaeng dapat menantikan semakin baiknya layanan pemerintah yang dirancang sesuai dengan kebutuhan warga berdasarkan data yang akurat. Akan lebih

banyak warga kelompok rentan seperti Sari, yang dapat menikmati masa tuanya dengan tenang, mengetahui bahwa pemerintah desa akan meringankan kehidupannya beserta anak cucunya.

Kini, seluruh 46 desa dan 21 kelurahan di delapan kecamatan Kabupaten Bantaeng telah mengadopsi FPLKD. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk bagi Masyarakat Rentan Adminduk dan Masyarakat Khusus Melalui Pelibatan Koordukcapil dan Pemerintah Desa. ■



Data kependudukan yang akurat memudahkan warga mengakses BLT-Dana Desa, PKH, Bantuan Sembako Desa, Pelayanan Kesehatan Gratis/BPJS, serta berbagai bantuan pemerintah ▲

Muni'ah dan Para Migran yang Akhirnya Beroleh Bansos



Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) di Kabupaten Sumbawa. ▲

Banyak warga Desa Tengah, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berasal dari keluarga pendatang –terutama dari Lombok. KTP dan KK lama yang tak diganti setelah migrasi dan lokasi mukim di tengah pelosok yang saling berjauhan membuat mereka kesulitan mengajukan bantuan sosial. Inisiatif Kepala Desa yang didukung KOMPAK, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, dan para pemangku kepentingan lainnya memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan dan akhirnya membuka jalan bagi mereka untuk mengakses berbagai jenis bantuan pemerintah.

Rumah kecil berdinding batu-bata merah tanpa plester itu luasnya hanya 24 meter persegi. Tidak ada tembok pemisah. Hanya sehelai kain lusuh yang jadi pembatas antara dapur, ruang tidur, dan ruang tamu. Jendelanya berupa papan-papan yang dilubangi sementara lantainya semen kasar. Di rumah yang berlokasi di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat inilah Muni'ah (45) menghabiskan hari-harinya bersama sang suami dan keempat buah hatinya.

Muni'ah tinggal di rumah untuk mengurus keempat buah hatinya. Salah seorang putranya yang berusia tiga tahun menderita hidrosefalus dan tak pernah dibawa berobat karena ketiadaan biaya. Suaminya, Hasanuddin (43), mengolah sawah tadah hujan milik keluarga dengan penghasilan yang tak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga terpaksa berhutang pada rentenir.



Pokja Adminduk membantu para warga rentan merekam data biometrik yang diperlukan untuk mengakses program bantuan sosial. ▲

Muni'ah bingung mengapa keluarganya tak kunjung menerima bantuan pemerintah sementara tetangga yang anaknya lebih sedikit justru mendapat modal usaha dan bantuan kesehatan. Ia tak tahu bahwa mereka sebetulnya bisa menerima bantuan asalkan memiliki dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kondisi keluarga Muni'ah yang serba memprihatinkan bukannya tak pernah mendapat perhatian sama sekali. Heru Prahara (45), Kepala Dusun Tengah, pernah menyampaikannya pada Dinas Sosial. Namun saat itu mereka hanya mendata dan menginformasikan bahwa Muni'ah dan keluarganya baru bisa menerima bantuan jika telah memiliki dokumen kependudukan.

Sebelum 2018, mengurus dokumen penduduk bukanlah perkara mudah. Warga harus menyambangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, di Kota Sumbawa Besar yang berjarak 52 kilometer dari Desa Tengah.

Proses mengurus dokumen kependudukan memang gratis. Namun warga harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membiayai perjalanan. Bis PP Desa Tengah-Sumbawa Besar memakan ongkos Rp25.000-35.000 dengan total waktu tempuh dua jam ditambah ojek dari terminal ke Kantor Disdukcapil Rp15.000 sekali jalan. Belum lagi konsumsi Rp50.000 untuk membeli makan atau kebutuhan di jalan. Jumlah ini sangat memberatkan warga Desa Tengah seperti Muni'ah yang sehari-harinya sudah sulit memenuhi kebutuhan pokok.

“Banyak pula pendatang dari Pulau Lombok yang tidak mengajukan surat pindah dari tempat asalnya sehingga dokumen kependudukan mereka tidak diperbaharui. Belum lagi rata-rata mereka tinggal di pelosok kebun atau hutan yang letaknya saling berjauhan. Akibatnya, mereka tidak dapat mengajukan bantuan sosial,” papar Kepala Desa Tengah, Rahim (52).

Rahim tak lantas pasrah. Ia terus mencari jalan membantu warganya. Semangatnya terpantik ketika akhirnya ia mendengar sejumlah cerita positif dari Kepala Desa Jorok, Motong, dan Pukat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD).

Mendengar kesuksesan sistem layanan adminduk FPLKD dari desa tetangga, Kepala Desa Tengah mulai menerapkan program serupa, yang melibatkan petugas lintas sektor sebagai fasilitator.

Pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan KOMPAK untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi warga tiga desa tersebut. Kerjasama layanan adminduk yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, puskesmas, bidan desa, kader posyandu, dan tenaga pendamping sosial.

Tertarik menerapkan program serupa, Rahim segera berkonsultasi dengan KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Awal 2018, Rahim bersama KOMPAK dan LPA NTB melangsungkan pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kepala dusun, kader Posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja Adminduk).

Pembentukan Pokja Adminduk merupakan buah dari terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 24/2018 tentang "Percepatan

Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sistem Layanan Terpadu dan Desa/Kelurahan". Lahirnya aturan yang kemudian berubah menjadi Peraturan Bupati 51 tahun 2019 ini tak lepas dari peran KOMPAK.

Perbup tersebut dilengkapi Perbup Kabupaten Sumbawa Nomor 11/2018 tentang "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul" yang memberikan wewenang pada desa untuk mendata penduduknya melalui Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD). Artinya, warga tak perlu lagi buang waktu dan ongkos ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa untuk mengurus dokumen kependudukan.

"Kami juga menyiapkan layanan khusus bagi PPKD di kantor Dinas Dukcapil serta membuat grup *WhatsApp* bersama PPKD dan Pokja Adminduk seluruh desa di Kabupaten Sumbawa demi mempermudah komunikasi, diskusi, dan koordinasi. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan adminduk," terang Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa periode 2016–2019, Zulqifli (55).

Berbekal harapan besar membantu warga desa yang membutuhkan, pembentukan Pokja Adminduk Desa Tengah berlangsung sangat lancar. Lenny Agustina (35) terpilih sebagai ketua sementara, Mastari (47) yang merupakan anggota BPD, menjabat sebagai

wakil ketua Pokja Adminduk.

Pokja Adminduk mendatangi langsung warga yang belum memiliki dokumen kependudukan terutama mereka yang tinggal di dusun-dusun terpencil, penyandang disabilitas, dan para lansia. Selain mendata dan menyosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan, Pokja Adminduk juga mengumpulkan berkas-berkas yang disyaratkan untuk mengurus dokumen kependudukan.

"Rumah kami didatangi Ibu Lenny. Ia bertanya apakah kami sudah punya KTP dan KK. Katanya, itu diperlukan kalau kami ingin mendapatkan bantuan pemerintah," tutur Muni'ah.

Rupanya KTP Muni'ah dan Hasanuddin sudah lama kadaluarsa sementara nama mereka masih tercantum di KK orang tua yang berdomisili di kampung asal, Lombok Timur. Selama ini, Muni'ah dan Hasanuddin enggan mengurus karena tidak punya biaya. Mereka mendengar kasak-kusuk tetangga bahwa mengurus dokumen kependudukan itu berbelit-belit hingga makan waktu berbulan-bulan.

Melalui upaya "jemput bola", Muni'ah dan Hasanuddin hanya perlu sehari untuk melengkapi persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Berkas-berkas mereka selanjutnya diserahkan Ketua Pokja pada Dinas Dukcapil. Tiga hari kemudian, PPKD mendapat



Pada bulan Desember tahun 2020, 55% desa memiliki setidaknya satu fasilitator adminduk yang terlatih untuk mengidentifikasi individu yang rentan, dan 33% desa ditawarkan secara online layanan pencatatan sipil. ▲

informasi bahwa KK terkini, KTP, dan Akta Kelahiran keempat buah hati Muni'ah selesai cetak dan siap diambil.

Muni'ah dan Hasanuddin terperangah, tak percaya mereka akhirnya berhasil mendapatkan dokumen kependudukan dengan sangat cepat dan mudah. "Rasanya seperti mimpi saja! Saya tidak perlu keluar uang, tidak perlu antri, tidak perlu bolak-balik ke kabupaten. Prosesnya begitu mudah dan cepat," ujar Muni'ah ketika menerima dokumen kependudukan yang lama ia impikan.

Melalui Musyawarah Desa, Pokja Adminduk, PPKD, dan Pemerintah Desa Tengah segera mengusulkan keluarga

Muni'ah dalam daftar keluarga tidak mampu. Tahun 2019, keluarga ini akhirnya mendapat bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk rehabilitasi bangunan rumah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP).

Proses rehabilitasi rumah berlangsung tiga minggu lebih. Rumah Muni'ah kini sudah



Peningkatan kapasitas desa dalam memberikan layanan adminduk terbukti berhasil meningkatkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, sekaligus membuka akses warga terhadap fasilitas bantuan pemerintah. ▲

berjendela sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik. Lantai disemen halus sementara dindingnya tersusun dari batu-bata permanen. Antar ruang tersekat rapi dengan tembok pemisah.

Berbekal dokumen kependudukan, Muni'ah dan keluarganya juga menerima aneka bantuan sosial lainnya seperti bantuan pendidikan, pelayanan dan asuransi kesehatan (BPJS), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, Muni'ah menerima BLT-Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan selama enam bulan. Bagi Muni'ah, apa yang ia alami merupakan sebuah keajaiban.

"Kalau sejak dulu tahu KTP dan KK bisa mengubah hidup seperti ini, saya pasti lebih semangat mengurusnya," cetus Muni'ah, "sekarang saya mendorong warga lainnya untuk mengurus KTP dan KK supaya hidup mereka juga lebih ringan." ■

Dokumen Kependudukan untuk Mengakses Layanan Pendidikan



Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany melihat langsung pelayanan adminduk di salah satu desa. ▲

Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany melihat langsung pelayanan adminduk di salah satu desa. Annur Aksal (3), anak dari pasangan M Jafar dan Sri Ati sempat ditolak mendaftar masuk PAUD. Pihak PAUD menolak karena Annur tidak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). "Kami hanya menerima anak yang sudah punya akta kelahiran dan KIA karena datanya diperlukan untuk pengisian Data Pokok Pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan," ungkap Yuli Suryani, guru PAUD Gesit Insani, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2017, anak usia 0-18 tahun di Desa Muer yang memiliki akta kelahiran masih kurang dari 50 persen. Menurut Evi Sulfiati, anggota Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan Desa Muer, masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukannya lantaran letak desa yang jauh dari ibu kota kabupaten dan rendahnya pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan.

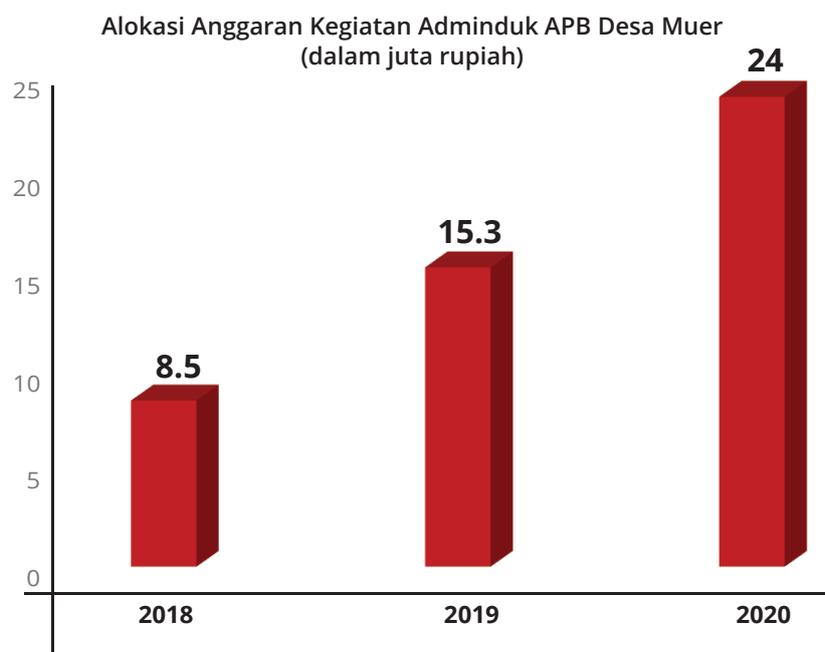
Pengurusan dokumen kependudukan hanya dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten. Dari Desa Muer, warga harus menempuh perjalanan selama dua jam dengan biaya sebesar Rp 60.000 sekali jalan. Kondisi ini memberatkan bagi warga meskipun pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil sendiri tidak dipungut biaya.

“Kalau kondisi ini berlangsung terus maka banyak anak di Desa Muer yang tidak bisa mendaftar masuk PAUD atau jenjang pendidikan lainnya. Hal inilah yang mendorong kami berinisiatif untuk membantu warga mengurus akta kelahiran dan KIA anak-anak mereka,” terang Yuli Suryani.

Berkaitan hal tersebut, KOMPAK mendorong dan membantu Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang “Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Pendidikan, Kesehatan, Sistem Pelayanan Terpadu, dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya, KOMPAK bersama Dinas Dukcapil memfasilitasi pelatihan untuk Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD), dan Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja Adminduk) tentang persyaratan dan mekanisme pengelolaan dokumen kependudukan, serta pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Pokja Adminduk kemudian memfasilitasi pendaftaran akta kelahiran dan KIA untuk seluruh murid PAUD Gesit Insani, serta memastikan bahwa orang tua murid memiliki kelengkapan dokumen kependudukan.

“PAUD bertugas mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan dokumen kependudukan. Pokja Adminduk memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum



diserahkan ke Dinas Dukcapil melalui PPKD, yang nantinya akan menyerahkan dokumen kependudukan yang sudah jadi kepada PAUD,” terang Evi Sulfiati.

Sejak 2018, Pemerintah Desa Muer mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kependudukan. Alokasi ini selalu meningkat setiap tahunnya. ■

Selain memfasilitasi proses pendaftaran dokumen kependudukan, Pokja Adminduk dan PPKD memberikan informasi tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Sementara itu, pemerintah desa menyediakan dana yang dibutuhkan untuk proses tersebut, sebagaimana dialokasikan dalam APB Desa Muer.

Hasilnya, pada 2020, sebanyak 90 persen anak usia 0-18 tahun di Desa Muer sudah memiliki akta kelahiran dan KIA. Kepemilikan dokumen kependudukan ini memungkinkan mereka mengakses layanan pendidikan dengan mudah. Di PAUD Gesit Insani misalnya, saat ini sebanyak 35 anak sudah mempunyai akta kelahiran dan KIA serta masuk dalam Dapodik.

“Kami sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, Pokja Adminduk dan Dinas Dukcapil secara langsung sehingga semua murid akhirnya bisa memiliki dokumen kependudukan,” kata Yuli.

Keberhasilan kerja antar pihak ini menyemangati Pemerintah Desa Muer. Sejak 2018, Pemerintah Desa Muer mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kependudukan. Alokasi ini selalu meningkat setiap tahunnya.

Peningkatan alokasi anggaran dilakukan karena masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dengan alasan tidak punya biaya. Selain itu, pemerintah desa juga ingin mempercepat terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan. Sebab, data kependudukan yang akurat membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran program kerja.

KOMPAK mendorong dan membantu Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang “Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Pendidikan, Kesehatan, Sistem Pelayanan Terpadu, dan Desa/ Kelurahan.

“Selain menyediakan alokasi anggaran untuk untuk Pokja Adminduk dan PPKD, kami juga mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional kegiatan PKK di program dasawisma dan posyandu yang terkait dengan kegiatan pendataan warga,” terang Asy Ariy, Kepala Desa Muer.

Salah satu caranya adalah mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan melalui kegiatan posyandu. Kader PKK akan datang ke rumah warga tersebut untuk melakukan pendataan lebih lanjut yang kemudian akan diserahkan ke Pokja Adminduk.

KOMPAK bersama Dinas Dukcapil memfasilitasi pelatihan untuk Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD), dan Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja Adminduk) tentang persyaratan dan mekanisme pengelolaan dokumen kependudukan, serta pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Kader PKK juga mengedukasi warga tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan melalui program dasawisma. Sebagai program yang mampu menjangkau unit terkecil masyarakat (keluarga), dasawisma menjadi salah satu media strategis pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

“Saat ini anggaran memang dipotong untuk penanganan pandemi COVID-19 tetapi anggaran untuk pelayanan adminduk tetap ada. Ke depannya, kami berharap anggaran dapat ditingkatkan lagi agar bisa menyediakan kendaraan untuk keperluan operasional,” tukas Asy.

Dokumen Kependudukan Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan



Warga Desa Ngumbul menyerahkan berkas untuk mengurus dokumen kependudukan (Foto: KOMPAK) ▲

Salim (65) warga Desa Ngumbul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, baru memiliki akta kelahiran beberapa bulan lalu. "Dulu di rumah nggak ada yang punya Akta Kelahiran, termasuk anak dan cucu saya. Dulu kami tidak tahu kalau Akta Kelahiran itu penting untuk mendapatkan layanan dari pemerintah," ujar Salim.

Pengalaman serupa Salim lumrah ditemui di Pacitan. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pacitan Ari Januarsih mengatakan bahwa kurangnya pemahaman dan jauhnya jarak untuk menjangkau pusat layanan menyebabkan tingginya jumlah warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

Situasi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan saat mereka akan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan Grindulu Mapan, karena mereka tidak memiliki data akurat jumlah warga yang menjadi sasaran program.

“Saat itu kami tidak tahu jumlah warga miskin, siapa saja mereka dan di dusun mana mereka tinggal, karena banyak dari mereka yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga,” terang Ari.

“Untungnya, KOMPAK membantu kami memastikan warga bisa mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat, sehingga program pemerintah dapat segera berjalan.”
Ibuhnya.

Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Pacitan saat itu adalah menyelenggarakan, Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (GERTAK) untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. GERTAK dilakukan dengan menerjunkan Petugas Registrasi Kependudukan – yang dilatih KOMPAK – untuk mendata masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Pendataan ini dilakukan khususnya bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.

Disdukcapil juga mengaktifkan berbagai bentuk inovasi layanan seperti Sidang Langsung Akta Kelahiran (Silades), Pelayanan Pro Aktif Petugas Registrasi Armada Motor (PPA Predator) dan mengunjungi rumah-rumah warga yang sakit, usia lanjut atau menyandang disabilitas untuk membantu mereka

mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

Keberhasilan kampanye ini membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. KOMPAK membantu Disdukcapil berkolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah, serta unit layanan lini depan seperti sekolah serta puskesmas untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

GERTAK dilakukan dengan menerjunkan Petugas Registrasi Kependudukan – yang dilatih KOMPAK – untuk mendata masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Pendataan ini dilakukan khususya bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.

Disdukcapil Kabupaten Pacitan berhasil menerbitkan sekitar 2.000 dokumen kependudukan pada akhir kegiatan. Jumlah tersebut termasuk Akta Kelahiran yang menjadi salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah Kabupaten Pacitan pun akhirnya mampu menjalankan program Grindulu Mapan berkat tuntasnya kepemilikan dokumen kependudukan.

KOMPAK membantu Disdukcapil berkolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah, serta unit layanan lini depan seperti sekolah serta puskesmas untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

“Pada Juni 2019, sebanyak 548 keluarga sasaran di Desa Ngumbul dapat merasakan manfaat Grindulu Mapan, diantaranya modal usaha bagi kelompok pengrajin, peternak dan produsen olahan makanan. Semua ini adalah berkat warga yang menjadi sasaran program ini sudah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan benar,” terang Miskun, Kepala Urusan Umum Desa Ngumbul.

Membangun Asa Desa Tuntas Adminduk di Lombok Timur



Mahasiswa sedang mengumpulkan persyaratan untuk pembuatan administrasi kependudukan warga di Lombok Timur. ▲

Program Universitas Membangun Desa (UMD) merambah ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Semangat kolaborasi implementasi KKN tematik administrasi kependudukan kali ini ditunjukkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim bersama dengan Universitas Mataram (UNRAM), Universitas Gunung Rinjani (UGR) dan Universitas Hamzanwadi di lima kecamatan. UNRAM memilih lokasi di Terara, Aikmel dan Lenek; UGR di Sembalun dan Sambalia; dan Universitas Hamzanwadi di Pringgabaya. Padatnya penduduk dan dampak gempa Agustus 2018 menjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi.

Persiapan dimulai pada Juni 2019 dengan penyusunan panduan KKN, dilanjutkan dengan pembekalan di masing-masing universitas, konsolidasi dan diskusi tentang tahapan serta teknis pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan desa lokasi KKN menjadi desa tuntas adminduk yang mencakup e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak dan akta kematian.



Warga menerima dokumen kependudukan dengan bantuan dari mahasiswa melalui KKN tematik adminduk (Foto: KOMPAK) ▲

Pada sosialisasi tanggal 22 Juli 2019, Dinas Dukcapil Lotim memantapkan peran untuk memastikan tujuan KKN tercapai sejalan dengan pencapaian target dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten tentang kependudukan. Sosialisasi dihadiri 250 stakeholders dari DPMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPT Dukcapil, UPT Pendidikan, KUA, camat, dan perwakilan 80 perwakilan mahasiswa.

Sosialisasi menyepakati pembagian peran di tiga tahapan; (1) Sosialisasi dan pendataan oleh mahasiswa, Pokja Adminduk dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); (2) Pemberkasan dan verifikasi oleh tim di tahap 1 bersama UPT Dukcapil kecamatan; (3) Penyiapan warga dan lokasi oleh mahasiswa, pelayanan dan penerbitan dokumen oleh Dinas Dukcapil Lotim, serta distribusi dokumen oleh mahasiswa dan perangkat desa. Seluruh tahapan didanai penuh dengan APBD Dinas Dukcapil Lotim.

“Saya mengapresiasi pendekatan yang dilakukan KOMPAK yang menyatukan semua stakeholder dari dusun hingga provinsi dengan pihak di luar pemerintahan seperti LPA, FITRA, PEKKA dan perguruan tinggi. Kami mendukung kegiatan KKN dengan sosialisasi kebijakan dan informasi pelayanan adminduk, berkoordinasi lebih intens dan berdiskusi mencari solusi jika ada persoalan di lapangan,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Lotim H. Sateriadi.

